

DINAMIKA ISLAM DI INDONESIA

Yuliana Ningsih¹, Sayyidah Hanifah², Mustika Sari'ah Siagian³

Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim, Pasir Pangaraian

ningsihyuliana221@gmail.com¹, syaidanhanifah@gmail.com²,

hananmustikasariahsiagian@gmail.com³

Abstrak: Dinamika Islam di Indonesia merupakan proses perkembangan Islam yang berlangsung secara bertahap dan damai melalui perdagangan, dakwah, pendidikan, serta interaksi sosial dan budaya. Penyebaran Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan budaya lokal menjadikan Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya, Islam tidak hanya berfungsi sebagai agama, tetapi juga memberikan pengaruh dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Pada masa kolonial, umat Islam menghadapi berbagai tantangan akibat dominasi bangsa Barat yang kemudian melahirkan gerakan pembaruan dan perlawanan. Memasuki masa kemerdekaan hingga era reformasi, Islam terus berkembang melalui organisasi Islam, modernisasi pendidikan, dan meningkatnya peran intelektual Muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, perkembangan tersebut juga menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan perubahan sosial budaya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman Islam yang moderat, inklusif, dan toleran agar tetap mampu menjadi kekuatan yang mendukung persatuan dan kemajuan bangsa.

Kata Kunci: Dinamika Islam, Indonesia, pendidikan Islam, reformasi.

Abstrack: The dynamics of Islam in Indonesia represent a gradual and peaceful process of Islamic development through trade, da'wah, education, and socio-cultural interactions. The adaptive spread of Islam toward local culture made it widely accepted by Indonesian society. In its development, Islam has functioned not only as a religion but also as an influence in social, political, economic, educational, and cultural aspects. During the colonial era, Muslims faced various challenges due to Western domination, which later encouraged reform and resistance movements. Entering the independence and reform eras, Islam continued to develop through Islamic organizations, educational modernization, and the increasing role of Muslim intellectuals in national life. However, these developments also face challenges such as globalization, radicalism, and socio-cultural changes. Therefore, a moderate, inclusive, and tolerant understanding of Islam is needed so that it can continue to support national unity and national progress.

Keywords: Dynamics Of Islam, Indonesia, Islamic Education, Reform Era.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga dinamika Islam di Indonesia menjadi topik yang penting untuk dikaji. Sejak awal masuknya Islam ke Nusantara, agama ini berkembang melalui proses yang damai, adaptif, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Hal tersebut menjadikan Islam di Indonesia memiliki karakter yang khas, yaitu moderat dan toleran. Perkembangan ini tidak terlepas dari peran para ulama, pedagang, serta tokoh masyarakat yang menyebarkan Islam melalui pendekatan kultural dan sosial.

Seiring berjalannya waktu, dinamika Islam di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan globalisasi. Pada masa kolonial, Islam berperan sebagai kekuatan perlawanan terhadap penjajah. Setelah kemerdekaan, Islam juga menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa, baik melalui organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, maupun partisipasi dalam sistem politik nasional.

Di era modern, dinamika Islam di Indonesia semakin kompleks. Munculnya berbagai aliran pemikiran, organisasi Islam, serta perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi cara umat Islam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Di satu sisi, hal ini memperkaya khazanah keislaman, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan bahkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, memahami dinamika Islam di Indonesia menjadi sangat penting untuk menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan Islam di Indonesia serta kontribusinya dalam membangun masyarakat yang damai, toleran, dan berkeadaban.

Pada pertengahan abad ke-19, Belanda dan Inggris berhasil memperkuat kekuasaan imperium mereka di kawasan Indonesia. Pada masa itu, umat Islam di wilayah tersebut belum menjadi satu kesatuan dalam bidang politik maupun budaya, melainkan masih terpisah ke dalam berbagai kelompok etnis dan bahasa. Kekuasaan Belanda dan Inggris membawa perubahan besar dalam kehidupan politik serta ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga memunculkan perlawanan dari kelompok nasionalis dan umat Islam terhadap campur tangan bangsa asing.

Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia merupakan suatu fenomena sejarah dan sosial yang menarik karena berlangsung secara damai, bertahap, serta mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Berdasarkan berbagai penelitian di daerah seperti Aceh, Jawa, Sumatra Barat, dan Maluku, diketahui bahwa proses Islamisasi tidak dilakukan melalui jalur peperangan, tetapi melalui hubungan sosial, kegiatan perdagangan, dan pendekatan budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis dinamika Islam di Indonesia secara mendalam berdasarkan perkembangan sejarah, sosial, budaya, politik, dan pendidikan Islam dari masa ke masa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan dinamika Islam di Indonesia. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan fakta-fakta mengenai perkembangan Islam di Indonesia serta menganalisis perubahan dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.

Adapun langkah-langkah analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data disajikan secara sistematis agar mudah dipahami, dan selanjutnya ditarik kesimpulan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika Islam di Indonesia secara komprehensif dan akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Islam Di Indonesia Pada Fase Kerajaan Dari Abad XIII Hingga XX M

Abad ke-13 menjadi salah satu masa penting dalam proses masuknya Islam ke wilayah Nusantara yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Pada masa ini, mulai terbentuk komunitas Muslim. Selain itu, terjadi juga proses percampuran antara ajaran Islam dengan budaya lokal, yang meliputi konflik, penyesuaian, dan penerimaan. Tidak hanya itu, pada periode ini juga mulai berdiri kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik Islam.

Lebih jauh lagi, sejak saat itu masyarakat mulai menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya mereka. Islam tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang asing, tetapi justru menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam disampaikan dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan dan bahasa masyarakat setempat, sehingga mudah diterima. Karena itu, proses penyebaran Islam tidak menimbulkan konflik sosial yang besar.

Akhirnya, Islam menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat di berbagai daerah. Hal ini terlihat dari penerimaan Islam oleh berbagai suku seperti Aceh, Minangkabau, Melayu, Jawa, Sunda, Banten, Madura, Banjar, Bugis, Sasak, hingga masyarakat di Ternate dan Ambon. Islam pun berkembang dan mengakar kuat dalam kehidupan mereka.

Islam masuk ke Indonesia tidak terjadi secara besar-besaran sekaligus, melainkan berlangsung bertahap. Wilayah dan kerajaan yang menerima kedatangannya pun memiliki kondisi politik serta sosial-budaya yang berbeda-beda. Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 hingga ke-8, pengaruhnya masih kuat. Namun, ketika Sriwijaya mulai mengalami kemunduran, para pedagang muslim yang kemungkinan juga datang bersama para mubalig memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan aktivitas perdagangan sekaligus memperluas pengaruhnya secara politik.

Mereka kemudian mendukung munculnya wilayah-wilayah baru yang bercorak Islam. Salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur laut Aceh (sekarang wilayah Lhokseumawe atau Aceh Utara), yang diperkirakan berdiri sejak abad ke-13.

Islam mulai berkembang di Indonesia melalui jalur perdagangan internasional sekitar abad ke-13. Para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab menjadikan pelabuhan-pelabuhan di Nusantara sebagai tempat singgah dalam aktivitas niaga mereka. Interaksi dagang tersebut tidak hanya sebatas pertukaran barang, tetapi juga melibatkan pertukaran budaya serta penyebaran ajaran Islam.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, sehingga interaksi antarbangsa menjadi sarana penting dalam penyebaran dakwah Islam. Penyebaran Islam melalui jalur perdagangan berlangsung secara damai, berbeda dengan proses ekspansi militer yang terjadi di beberapa wilayah lain.

Para pedagang Muslim menampilkan akhlak terpuji serta menerapkan etika berdagang yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Rasulullah SAW bersabda bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada (HR. Tirmidzi), yang menegaskan pentingnya kejujuran dalam aktivitas ekonomi.

Masuknya Islam ke Nusantara tidak dilakukan dengan paksaan, melainkan melalui proses bertahap yang menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sifat fleksibel dalam menghadapi keberagaman budaya lokal. Sejumlah kerajaan di Nusantara tertarik untuk memeluk Islam karena ajaran dan sistem hukumnya dinilai lebih adil serta teratur.

Di samping itu, Islam juga membawa ajaran tauhid dan prinsip keadilan sosial yang menarik perhatian masyarakat pesisir, terutama mereka yang mengalami ketimpangan ekonomi akibat dominasi perdagangan oleh pihak asing. Nilai-nilai tersebut selaras dengan firman Allah dalam Surah Al-Nahl ayat 90 yang menganjurkan untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, dan membantu sesama.

Dengan demikian, proses masuknya Islam ke Indonesia bukan hanya sekadar peristiwa keagamaan, tetapi juga merupakan bagian dari perkembangan sosial dan budaya masyarakat Nusantara. Jalur perdagangan menjadi pintu awal yang kemudian diperkuat melalui kegiatan dakwah dan pendidikan.

B. Dinamika Islam di Indonesia Pada Masa Kolonialisme Belanda dan Jepang

Pada awal masa pemerintahan Jepang di Hindia Belanda, kedatangannya sempat disambut dengan rasa senang oleh rakyat Indonesia. Hal ini karena Jepang dianggap sebagai pihak yang bisa membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Keyakinan tersebut semakin kuat karena Jepang sering memberikan janji dan harapan tentang kemerdekaan kepada rakyat yang memang sedang memiliki semangat nasionalisme yang tinggi.

Di sisi lain, Jepang sebenarnya datang dengan tujuan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Jepang membutuhkan sumber daya alam dan tenaga manusia dari Indonesia. Oleh karena itu, Jepang berusaha mendekati rakyat Indonesia agar mendapatkan dukungan dan simpati. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui propaganda, termasuk di bidang pendidikan.

Setelah Jepang mulai berkuasa, hanya sedikit sekolah yang diizinkan untuk dibuka kembali (Makmur, dkk., 1993: 100). Selain itu, persiapan dalam penyelenggaraan pendidikan juga belum maksimal. Banyak kendala yang harus dihadapi, salah satunya adalah kekurangan tenaga pengajar, terutama guru untuk tingkat sekolah menengah.

Dalam sudut pandang keagamaan, praktik penjajahan dipahami sebagai bentuk ketidakadilan yang merusak tatanan sosial sekaligus moral masyarakat, serta termasuk dalam kategori dosa besar yang menuntut adanya perlawanan nyata. Dalam sejarah Indonesia, penjajahan dipandang sebagai ancaman bersama yang harus dihapuskan demi menjaga keutuhan dan martabat bangsa.

Oleh karena itu, upaya membangun kesadaran kritis terhadap berbagai bentuk penjajahan perlu dilakukan secara terus-menerus dan ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar nilai-nilai anti-penjajahan tidak hanya menjadi kewajiban individu (fardhu 'ain), tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif (fardhu kifayah) dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan Islam di Nusantara telah berkembang sejak abad ke-7, seiring dengan masuknya Islam melalui jalur perdagangan. Para pedagang dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok turut menyebarkan ajaran Islam yang bersifat terbuka dan mampu beradaptasi dengan budaya lokal, sehingga mudah diterima oleh masyarakat.

Sejalan dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh, pendidikan Islam pun mengalami kemajuan yang pesat. Lembaga-lembaga seperti pesantren, surau, dan masjid berperan sebagai pusat pembelajaran agama, dengan pesantren menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan pendidikan Islam.

Pada pertengahan abad ke-19, Belanda dan Inggris telah memperkuat kekuasaan mereka di wilayah Indonesia. Pada masa itu, umat Islam belum menjadi satu kesatuan dalam satu imperium atau budaya, melainkan masih terpecah ke dalam berbagai kelompok etnis dan bahasa. Dominasi kedua bangsa Eropa tersebut membawa perubahan besar dalam bidang politik dan ekonomi di Indonesia, sekaligus memicu munculnya perlawanan dari kalangan nasionalis dan umat Islam terhadap campur tangan pihak asing.

Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam sering disebut sebagai pendidikan bumiputera, karena pesertanya adalah masyarakat pribumi Indonesia. Pada masa itu, terdapat tiga bentuk pendidikan Islam, yaitu:

a) Sistem peralihan Hindu-Islam

Sistem ini merupakan gabungan antara pendidikan Hindu dan Islam. Dalam praktiknya, ada dua cara: pertama, guru datang mengajar ke murid yang biasanya berasal dari kalangan bangsawan atau keraton. Kedua, murid datang ke tempat guru (seperti pertapaan), dan muridnya tidak hanya dari bangsawan, tetapi juga dari masyarakat biasa.

b) Sistem pendidikan surau (langgar)

Pendidikan di surau tidak memiliki jenjang kelas. Murid belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing dan bebas memilih kelompok belajar. Proses belajar sederhana, tanpa meja atau papan tulis, dan menggunakan kitab kuning sebagai bahan utama. Metode yang digunakan biasanya ceramah, membaca, dan menghafal. Kegiatan belajar dilakukan dengan duduk melingkar (halaqah), di mana guru menjelaskan materi dan murid menyimak serta mencatat.

c) Sistem pendidikan pesantren

Di pesantren, metode yang digunakan adalah sorogan, yaitu pembelajaran secara

individu atau kelompok kecil. Biasanya, kiai mengajar langsung santri yang masih tingkat dasar secara lebih fokus.

Perkembangan Islam semakin kuat setelah berdirinya Kerajaan Islam Banjarmasin yang dipimpin oleh Sultan Suriansyah. Sejak saat itu, masjid mulai dibangun di hampir setiap desa sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat. Pada tahun 1710 M (13 Safar 1122 H), pada masa pemerintahan Sultan Tahmilillah (1700–1748), lahirlah seorang ulama terkenal bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Desa Kalampayan, Martapura. Sejak kecil, beliau diasuh oleh Sultan Tahmilillah.

Syekh Muhammad Arsyad kemudian menuntut ilmu di Mekkah selama kurang lebih 30 tahun. Karena kesungguhan dan kedalaman ilmunya, beliau menjadi ulama yang sangat terkenal, tidak hanya di Kalimantan dan Indonesia, tetapi juga hingga ke kawasan Asia Tenggara.

C. Perkembangan Islam Pada Masa Kemerdekaan (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi)

a) Orde Lama

Orde lama merupakan orde yang terjadi pada periode pemerintahan Presiden Ir. Soekarno tahun 1945 sampai tahun 1968. Ir. Soekarno memerintah Negara Indonesia dengan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Pada saat awal kemerdekaan. Pemerintah Republik Indonesia sudah mengadakan pembinaan mengenai pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946.

Dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan agama Islam ini dilakukan dengan cara tradisi formal yang diamanatkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Agama. "Pendidikan Agama Islam akan diatur oleh pemerintah mulai Desember 1946 di sekolah-sekolah umum, sebelum pendidikan agama yang digunakan sebagai pengganti pendidikan budi pekerti di mana sudah ada dari zaman Jepang di beberapa daerah".

Sebelum kemerdekaan Indonesia, sebenarnya Departemen agama sudah ada. Namun sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan nama *Kantoor voor Inlandshe Zaken*, kemudian di zaman penjajahan Jepang dinamai *Shukuma*, Kemudian, Indonesia merdeka pada tanggal 3 Januari 1946 berubah menjadi Kementrian Agama.

Pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka dibentuklah kepanitiaan perumusan kebijakan pendidikan dengan pemaparan berupa model pendidikan Islam lama dan model baru, mengatakan: "Pada hakikatnya madrasah dan pesantren merupakan sumber pendidikan dan alat untuk mencerdaskan rakyat, yang sudah mendarah daging pada rakyat Indonesia, sebaiknya madrasah/pesantren memperoleh perhatian nyata berupa bantuan materiil dan berupa tuntunan dari pemerintah, karena lembaga tersebut menyediakan pendidikan agama dan termasuk dalam Departemen Agama".

Walaupun banyak yang menyambutnya dengan baik akan sumbangan materiil dan pemberian fasilitas oleh kebijakan Pemerintahan Orde lama, akan tetapi terdapat beberapa masyarakat yang tidak menyetujui. Setelah pemerintah colonial Belanda beberapa waktu lalu telah memojokkannya. Kebijakan Pemerintah pada masa Orde Lama ini dianggap fase untuk melakukan pengembangan terhadap pendidikan Islam di Indonesia.

Kebijakan pemerintah Orde Lama ini merupakan awal mula dari munculnya pendidikan Islam yang terjadi secara menyeluruh dari kelembagaan (madrasah) maupun non lembaga (masjid dan surau yang digunakan sebagai tempat untuk mengaji). Madrasah di Indonesia yang dikelola oleh suatu organisasi sosial kemasyarakatan banyak dipengaruhi oleh orientasi organisasinya.

Peran yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan madrasah yang dimiliki Departemen Agama pada masa Orde Lama adalah semangat yang tinggi dan kegigihan yang sangat intens dalam mempertaruhkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Mengajarkan

pendidikan agama di sekolah-sekolah menjadi salah satu cara untuk penyesuaian Departemen Agama selain pada peluasan madrasah itu sendiri. Usaha tersebut secara khusus diatasi oleh satuan yang mengelola pendidikan agama.

b) Orde Baru

Pada masa pemerintahan Soeharto, kekuasaan sangat kuat dan cenderung militeristik, sehingga peran masyarakat sipil menjadi terbatas. Hal ini terlihat dari penyederhanaan partai politik pada tahun 1970-an menjadi tiga saja, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Dalam kenyataannya, Golkar yang dekat dengan pemerintah selalu menang dalam pemilu.

Di sisi lain, suara umat Islam yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara hampir tidak terdengar. Hal ini karena pemerintah sangat mengontrol organisasi dan masyarakat. Pada tahun 1980-an, muncul kebijakan asas tunggal Pancasila, yang mewajibkan semua organisasi memakai Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Meskipun begitu, pemerintah juga memberikan beberapa kebijakan yang mendukung umat Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan (1974), Undang-Undang Peradilan Agama (1989), dan Kompilasi Hukum Islam (1991). Selain itu, ada juga kebijakan tentang penggunaan jilbab di sekolah dan pengelolaan zakat.

Pada tahun 1990-an, muncul ICMI yang dipimpin oleh B.J. Habibie, serta berdirinya Bank Muamalat yang menggunakan sistem syariah. Hal ini menunjukkan bahwa peran Islam mulai terlihat kembali, termasuk dengan masuknya tokoh-tokoh Islam ke parlemen. Secara singkat, ada dua tahap penting: pertama, saat gerakan Islam dibatasi oleh pemerintah; kedua, saat pemerintah mulai mendekati umat Islam untuk mempertahankan kekuasaannya.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, lahirnya ICMI pada tahun 1990-an dapat dipandang sebagai awal munculnya kembali gagasan Islam dalam kehidupan bernegara. Walaupun tidak secara langsung menyerukan penerapan syariat Islam, keberadaan ICMI yang dipimpin oleh tokoh intelektual Muslim, Dr. Ir. B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, dianggap sebagai tanda kebangkitan Islam yang sebelumnya tampak terabaikan dan tertekan.

c) Reformasi

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menjadi titik penting terjadinya perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan Islam. Jatuhnya pemerintahan Orde Baru membawa suasana baru berupa demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan yang memberikan kesempatan luas bagi pendidikan Islam untuk berkembang menjadi lebih inklusif, modern, dan mampu bersaing.

Namun, pada masa ini juga muncul berbagai tantangan baru, seperti pengaruh globalisasi, munculnya paham radikalisme, serta ketimpangan mutu pendidikan di berbagai daerah. Kondisi tersebut menjadikan Era Reformasi sebagai periode yang menarik untuk ditelaah secara lebih mendalam.

Reformasi menurut kamus ilmiah populer diartikan sebagai perubahan, perbaikan, atau pembentukan kembali. Secara umum, reformasi berarti suatu perubahan yang bersifat mendasar dengan tujuan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun agama dalam suatu masyarakat. Dalam konteks agama, reformasi tidak dimaksudkan untuk mengubah syariat, karena syariat bersifat tetap dan tidak berubah.

Yang mengalami perubahan adalah cara berpikir atau penafsiran terhadap syariat tersebut agar lebih sesuai dengan maksud ajaran Al-Qur'an. Istilah lain yang berkaitan dengan perubahan ini, seperti rekonstruksi (penyusunan ulang), reaktualisasi (penyegaran kembali), dan reinterpretasi (penafsiran ulang), pada dasarnya juga mengandung upaya memperbaiki dan menata kembali hal-hal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Tuntutan reformasi muncul karena adanya kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang dinilai tidak lagi selaras dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Jika dikaitkan dengan istilah "era" yang berarti masa atau periode waktu tertentu, maka era

reformasi di Indonesia merujuk pada masa setelah B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden.

Masa ini dikenal luas sebagai titik perubahan penting yang dianggap membawa harapan baru bagi masyarakat. Reformasi muncul akibat krisis ekonomi yang menyebabkan beban hidup masyarakat semakin berat. Selain itu, era ini juga merupakan hasil perjuangan bersama antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam dengan tujuan utama memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

D. Konsep Ideologi Transnasional di Indonesia

Secara bahasa, transnasional adalah istilah yang berarti sesuatu yang melampaui batas negara. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan hubungan, interaksi, atau pengaruh yang tidak hanya terjadi di satu negara saja, tetapi juga melibatkan banyak negara dan budaya. Dalam hal ini, transnasional mencakup pertukaran ide, nilai, dan praktik yang bisa memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas, baik dalam bidang sosial, politik, maupun agama.

Transnasionalisme sendiri adalah konsep tentang kerja sama atau hubungan antar kelompok yang berasal dari berbagai negara, terutama yang bukan pemerintah, seperti perusahaan internasional, kelompok keagamaan, atau bahkan kelompok tertentu lainnya. Hubungan ini membentuk jaringan yang luas dan dapat memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik di tingkat dunia.

Istilah "Islam transnasional" pada awalnya banyak ditolak karena dianggap bisa memecah persatuan umat Islam. Istilah ini mulai sering dibahas ketika ada sebagian kelompok Islam yang menyuarakan penolakan terhadap demokrasi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh KH. Hasyim Muzadi, yang menjelaskan bahwa Islam transnasional adalah kelompok yang ingin melakukan perubahan sosial dan keagamaan secara radikal, bahkan melampaui batas-batas nasionalisme Indonesia.

Hubungan umat Islam Nusantara dengan Timur Tengah telah melahirkan banyak ulama. Banyak orang Nusantara pergi ke sana untuk belajar agama, lalu kembali ke Indonesia untuk menyebarkan ilmu yang mereka peroleh. Pengaruh gerakan pembaruan (revivalisme) Islam dari Timur Tengah sudah terasa sejak abad ke-17, dan ikut melatarbelakangi lahirnya organisasi seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1924). Para pendirinya juga pernah menuntut ilmu di Timur Tengah.

Sekembalinya ke Indonesia, para pelajar dan ulama ini menyebarkan berbagai gagasan keagamaan dengan pemikiran yang beragam, terutama di kalangan masyarakat kota, pelajar, dan mahasiswa. Di kampus, ide-ide tersebut berkembang melalui organisasi seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK) serta kegiatan di masjid atau musala.

Transnasionalisme Islam di sini merujuk pada pengaruh pemikiran Islam dari Timur Tengah di Indonesia. Namun, gerakan ini tidak bisa disamaratakan sebagai radikal atau ekstrem saja, karena ada juga yang bersifat moderat. Meski begitu, dalam beberapa hal, pengaruh ini tetap dianggap memiliki tantangan bagi penguatan negara Indonesia.

Ideologi dan tujuan gerakan garis keras di Indonesia berasal dari pemikiran yang cenderung bersifat total dan terpusat, serta mengaitkan syariat Islam dengan kepentingan politik. Mereka memiliki pandangan bahwa ajaran agama, khususnya syariat, tidak hanya mengatur kehidupan pribadi, tetapi juga harus diterapkan dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, menurut mereka, pelaksanaan syariat tidak bisa dipisahkan dari dunia politik, karena keduanya dianggap saling berkaitan dan harus berjalan bersama.

Pada dasarnya, Islam di Indonesia memang menunjukkan karakter yang terbuka terhadap pengaruh luar atau transnasional, baik dalam hal mazhab, aliran, maupun praktik keagamaan. Hal ini terlihat dari dominannya mazhab Sunni yang berkembang luas di masyarakat, di samping adanya kelompok-kelompok lain seperti Syi'ah dan aliran keagamaan lainnya yang juga ikut memberi warna dalam kehidupan beragama.

Namun, dalam kajian-kajian terbaru, pembahasan tentang transnasionalisme Islam di Indonesia sering kali tidak lagi hanya dilihat sebagai proses pertukaran pemikiran dan budaya keagamaan semata. Narasi yang muncul cenderung mengaitkannya dengan kepentingan politik, baik yang berkaitan dengan identitas kelompok (politik aliran) maupun dengan kekuasaan. Akibatnya, transnasionalisme Islam tidak hanya dipahami sebagai fenomena keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial-politik yang dapat memengaruhi arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Hubungan Antara Agama dan Negara di Indonesia

Diskursus mengenai hubungan antara agama (al-din) dan negara (al-dawlah) merupakan topik yang sejak lama diperdebatkan oleh para pemikir Muslim hingga sekarang. Berbagai penelitian dilakukan untuk melihat kesesuaian ajaran Islam dengan sistem politik di masyarakat Muslim. Namun, karena penerapan Islam dalam negara berbeda-beda, sulit untuk menentukan satu model negara Islam yang pasti. Perdebatan ini kemudian melahirkan berbagai pandangan, yaitu ada yang mendukung penyatuan agama dan negara, ada yang ingin memisahkannya, serta ada yang memilih jalan tengah di antara keduanya.

Berdasarkan pengertian agama dan negara menurut KBBI, terdapat setidaknya tiga titik temu antara keduanya. Pertama adalah aspek kekuasaan. Agama berkaitan dengan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan negara merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Agama mengklaim kekuasaan atas nama Tuhan, sementara negara menjalankan kekuasaannya berdasarkan kedaulatan dan legitimasi yang dimilikinya.

Kedua adalah hubungan antar manusia. Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya serta dengan lingkungan. Di sisi lain, negara terdiri dari sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Negara berperan mengatur kehidupan sosial tersebut melalui kekuasaan yang dimilikinya.

Ketiga adalah aspek hukum. Agama memiliki aturan berupa perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh penganutnya. Begitu pula negara, yang menetapkan berbagai peraturan bagi warga negaranya. Jika hukum negara tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka akan tercipta hubungan yang harmonis antara keduanya. Namun, jika terjadi pertentangan, maka dapat menimbulkan konflik antara agama dan negara.

Di Indonesia, pembahasan mengenai hubungan agama dan negara bukanlah hal baru, tetapi tetap relevan hingga sekarang. Menurut Yudi Latif, jika dilihat dari sudut pandang religio-politik, sejarah Indonesia modern menunjukkan adanya ketegangan antara upaya sekularisasi dan islamisasi dalam kehidupan negara dan masyarakat. Konflik antara kedua arus ini cukup kompleks. Hubungan antara agama dan negara juga dijelaskan oleh J. Philip Wogeman, yang membaginya menjadi tiga pola utama.

Pertama, teokrasi, yaitu ketika agama menguasai negara. Kedua, erastianisme, yaitu ketika negara justru mengendalikan agama. Ketiga, hubungan sejajar antara agama dan negara, baik dalam bentuk pemisahan yang tidak bersahabat maupun yang bersahabat. Pemisahan yang tidak bersahabat sulit terjadi karena agama selalu memiliki dimensi sosial yang berkaitan dengan hukum negara. Oleh karena itu, pemisahan yang bersifat bersahabat dianggap sebagai pilihan yang paling memungkinkan, meskipun tetap memiliki tantangan.

Selain itu, terdapat tiga aliran pemikiran utama mengenai hubungan agama dan negara. Pertama, paham teokrasi yang menyatakan bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan dan negara dikendalikan oleh lembaga keagamaan. Kedua, paham sekuler yang menegaskan bahwa agama dan negara harus dipisahkan. Ketiga, paham moderat yang menjadi jalan tengah antara kedua pandangan tersebut. Ketiga pandangan ini biasanya dibahas lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

KESIMPULAN

Dinamika Islam di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan Islam selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Islam tidak hanya berfungsi sebagai agama, tetapi juga berperan dalam kehidupan sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Penyebaran Islam yang dilakukan secara damai membuat ajaran Islam dapat diterima dengan baik dan menyatu dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai utamanya.

Di zaman sekarang, Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, serta perbedaan pandangan di dalam masyarakat. Meskipun demikian, kondisi ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat sikap toleransi, saling menghargai, dan menjaga persatuan. Secara umum, Islam di Indonesia tetap berkembang dengan ciri khas yang ramah, terbuka, dan menghargai keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afima, Oby Ara, Muhammad Fazli, and Ellya Roza. "Kondisi Pendidikan Islam Pada Era Penjajahan Belanda Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4 (2025).
- Ahmad Sadzali. *Relasi Agama dan Negara*. Pusat Study Hukum Islam (PSHI), 2018.
- Aksa. "Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah Dan Pengaruhnya Di Indonesia." *Yupa: Historical Studies Journal* 1, no. 1 (2017).
- Amin, Muh. "Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda Dan Jepang." *Jurnal Pilar* 10, no. 2 (2019).
- Arifin, Faizal. "Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 4 (2021): 542–46. <https://doi.org/10.15575/jis.v1i4.13390>.
- Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Kencana, 2004.
- Duriana. "ISLAM DI INDONESIA SEBELUM KEMERDEKAAN." *DIALEKTIKA* 9, no. 2 (2015).
- Firdaus, Muhammad Anang. "Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya." *Jurnal Multikultural dan Multireligius* 13, no. 3 (2014).
- Hasnida, Hasnida. "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme Dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu)." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 2 (2017): 237–56. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i2.6442>.
- Ichsan, Yazida. "Implikasi Pendidikan Islam di Indonesia pada Zaman Orde Lama, Baru, dan Reformasi." *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2021): 8–15. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i2.1753>.
- Iskandar, Muhammad and dkk. *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia*. Direktor Sejarah dan Nilai Budaya, Direktor Jendral Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.
- Kesuma, Sena Pujana, and Luqman Abdul Aziz. "Penyebaran Islam Di Indonesia Dan Pengaruhnya Sosial- Budayanya." *AR- RUHUL ILMI Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2025).
- M, Ira, and Lapidus A. "History of Islamic Societies, Diterjemahkan Oleh Ghufroon A. Maadi Dengan Judul Sejarah Sosial Ummat Islam." Jakarta PT. Raja Grafindo, 1999.
- M, M. Dahlan. "Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia Era Reformasi." *Jurnal Adabiyah* 11, no. 1 (2011).
- Maarif, Ahmad Syarif. *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*. Mizan, 2009.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Modern Dan Keindonesiaan*. Mizan, 2008.
- Maulana Yusup Aldi R, M. Hasibuddin. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Produktif (Studi Kasus di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang)." Preprint, Zenodo, July 17, 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16040496>.
- Maulia, Siti Tiara, Hendra Hendra, and Muhammad Ichsan. "Jejak Perkembangan Islam Pada Kerajaan -Kerajaan Islam Di Indonesia." *JEJAK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah* 2, no. 2 (2022): 77–84. <https://doi.org/10.22437/jejak.v2i2.22477>.
- Nasir, Muhammad, and Abdullah Khusairi. "ISLAM TRANSNASIONAL : TANTANGAN BAGI MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA." *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 4, no.

- 1 (2024): 15–34. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.8847>.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia*. LP3ES, 1900.
- Nuri Hafidha Sari, Mei, Ewiniarti Hawa, Febby Aulia Sari, and Mahfud Ifendi. “Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Era Reformasi.” *ISEDU : Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2024): 127–33. <https://doi.org/10.59966/isedu.v2i2.1516>.
- Sinaga, Rosmida, Ida Maria Sidauruk, Rayhan Harahap, Marhenta Nababan, and Syadiah Siregar. “Perbandingan Kebijakan Pendidikan di Era Kolonialisme Belanda dan Jepang di Indonesia.” *INNOVATIVE; Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).
- Syaifuddin, Mohammad. “Menangkal Pemahaman Radikal dan Fundamental Ideologi Transnasional Melalui Pendidikan Islam: Menangkal Pemahaman Radikal dan Fundamental Ideologi Transnasional Melalui Pendidikan Islam.” *AL-MUTSLA* 6, no. 2 (2024): 587–604. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2.1164>.
- Syamsuddin, M., and M. Fathan. “DINAMIKA ISLAM PADA MASA ORDE BARU.” *JURNAL DAKWAH* 11, no. 2 (2010).
- Syamsuddin, Muh, and Muh Fatkhan. “Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru.” Nur Kamila: Keberfungsian Sosial Keluarga Komunitas Pemulung, n.d.